



---

## Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat

Nining Suriani<sup>1</sup>, Disna Anum Siregar<sup>2</sup>

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah<sup>1,2</sup>

Email Korespondensi: [niningsuriani@umnaw.ac.id](mailto:niningsuriani@umnaw.ac.id), [disnaanumsiregar@umnaw.ac.id](mailto:disnaanumsiregar@umnaw.ac.id)

---

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 20 Oktober 2025

---

### ABSTRACT

Poverty remains a complex social issue in many rural areas of Indonesia, including Amabaan Village, which is characterized by a low level of community welfare. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in improving community welfare in the village. A qualitative approach was employed, involving 265 beneficiary families as the population and 40 families as the sample using a proportional random sampling technique. Data were collected through questionnaires, observations, interviews, and documentation, and analyzed using Miles and Huberman's model. The findings revealed that the implementation of PKH was generally effective, with a program implementation success rate of 84.7% and effectiveness reaching 83.53%. PKH significantly contributed to fulfilling the basic needs of poor families, particularly in education and healthcare, although challenges remain, such as inaccurate targeting and limited assistance amounts. These results highlight the importance of improving data validation, enhancing program outreach, and optimizing mentoring efforts to ensure that PKH delivers a more sustainable impact on community welfare.

**Keywords:** Family Hope Program, Welfare, Amabaan Village

### ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di berbagai daerah pedesaan Indonesia, termasuk Desa Amabaan, yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan melibatkan 265 keluarga penerima manfaat sebagai populasi, dan 40 keluarga sebagai sampel melalui teknik *proportional random sampling*. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara umum telah berjalan efektif dengan capaian tingkat keberhasilan pelaksanaan sebesar 84,7% dan efektivitas program mencapai 83,53%. PKH terbukti berperan signifikan dalam membantu kebutuhan dasar keluarga miskin, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan besaran bantuan yang terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan validasi data, sosialisasi yang lebih intensif, dan optimalisasi pendampingan agar PKH dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan, Desa Amabaan

## PENDAHULUAN

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi Aceh yakni 15,33 persen pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk sekitar 96 ribu jiwa dengan total 18 ribuan jiwa berpenduduk miskin (BPS, 2024). Menurut Ferdi (2021:56), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, diantaranya adalah keterbatasan akses ke lapangan pekerjaan, infrastruktur yang masih minim, dan ketergantungan pada sektor perikanan dan pertanian tradisional yang rentan terhadap perubahan musim dan kondisi ekonomi. Ketimpangan ekonomi turut memperkuat kemiskinan di Simeulue, terutama di wilayah pedesaan yang terisolir, di mana akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan sangat terbatas (Sari, 2022:12). Desa-desa ini jauh dari pusat ekonomi dan layanan publik, membuat masyarakat setempat sulit memperoleh pendapatan yang stabil dan cukup. Banyak penduduk desa yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional yang hasilnya sangat dipengaruhi oleh musim dan sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan lapangan kerja yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada (Mulyono, Fikri & Munawaroh, 2024).

Desa Amabaan tergolong sebagai desa dengan kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Simeulue. Persentase penduduk miskin yang cukup tinggi mencapai sekitar 18,98% dari total populasi desa. Menurut Amrijal (2023:26), dari sekitar 1.200 penduduk, lebih dari 220 Kepala Keluarga termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Rendahnya tingkat kesejahteraan di desa Amabaan menunjukkan tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masih terdapat banyak masyarakat yang tidak sejahtera dan menjadi permasalahan serius, meskipun berbagai upaya pemerintah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Tingginya tingkat inflasi dan dampak dari krisis ekonomi global turut memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan di Desa Amabaan (Desky, 2024:11). Menurut Fedihartono, Virjannah dan Yasin (2023:12) kondisi geografis desa Amabaan yang menantang serta keterbatasan akses membuat program-program pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tersebut menghadapi kendala besar. Dengan kondisi kemiskinan ini, Desa Amabaan menjadi prioritas dalam program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat. Skema pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan di desa Amabaan telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan bantuan, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007. PKH terus mengalami peningkatan jumlah target sasaran sebagai upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. PKH yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program

ini bertujuan untuk menyediakan bantuan langsung yang bersyarat, dengan fokus pada perbaikan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga prasejahtera. Melalui peningkatan jumlah penerima manfaat setiap tahunnya, PKH berperan dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

PKH membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan mendorong partisipasi mereka dalam aktivitas sosial dan ekonomi di desa. Amabaan Selain itu, melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, penerima manfaat PKH mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan kesehatan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah di masa depan. Dengan keberlanjutan dan pengelolaan yang tepat, PKH menjadi langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kesejahteraan yang lebih merata di Desa Amabaan. Kesejahteraan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kualitas hidup individu dan kelompok dalam suatu komunitas (Rahmawati, 2023:9). Menurut Elfiswandi (2022:31), kesejahteraan bukan hanya diukur dari pendapatan atau kekayaan materi, tetapi juga dari rasa aman, kesempatan untuk berkembang, serta kemampuan untuk mengakses berbagai layanan sosial yang penting untuk kehidupan yang bermartabat. John Rawls (1971), mengajukan teori keadilan sosial yang juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, struktur, tingkat lapangan kerja, tarif dan pola konsumsi dan kondisi perumahan (Sastrawan, Samsi & Seran, 2024:11).

Berdasarkan data penerima PKH di desa Amabaan hanya 35% keluarga miskin yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 65% lainnya tidak menerima bantuan ini meskipun masuk dalam kategori keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH belum sepenuhnya mencakup seluruh keluarga yang membutuhkan. Penyebabnya meliputi kendala dalam validasi data penerima, minimnya sosialisasi program, dan keterbatasan kuota bantuan yang diberikan (Effendi, 2023:17). Data ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi program agar dapat menjangkau lebih banyak keluarga miskin secara efektif.

Menurut observasi awal penulis, pelaksanaan PKH di desa Amabaan masih belum tepat sasaran dan efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan. Banyak keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima, sementara sebagian penerima manfaat diketahui memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan keluarga yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasakan bahwa bantuan PKH belum sepenuhnya berhasil menyejahterakan mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, besaran bantuan yang terbatas dan frekuensi pencairan yang kurang memadai membuat dampak

positif PKH terhadap perbaikan ekonomi keluarga miskin masih belum signifikan. Akibatnya, meskipun PKH bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, program ini belum optimal dalam mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan karena PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Amabaan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bantuan yang diberikan melalui PKH tepat sasaran dan benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini juga dapat menemukan kendala atau kelemahan dalam pelaksanaan PKH di desa Amabaan, seperti ketidaktepatan data penerima, besaran bantuan yang tidak mencukupi, atau kurangnya pendampingan yang efektif. Dengan memahami efektivitas PKH di Desa Amabaan, pemerintah dan pihak terkait dapat merancang strategi yang lebih baik untuk memastikan program ini memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Amabaan.

Efektifitas merupakan salah satu konsep yang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan tertentu dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Menurut Maklassa (2023:146). Ambarwati (2021:46) mengemukakan bahwa efektifitas adalah kemampuan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tepat, baik dari segi sasaran yang ingin dicapai maupun cara pelaksanaannya. Menurut Kurniawan dan Priambodo (2022:12) efektifitas merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu proses atau kegiatan berhasil dalam mencapai tujuan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efektifitas program menggunakan teori menurut Budiani (2007:53) yang terdiri dari empat indikator yakni dengan melihat sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Menurut Mujiyadi (2019:2), pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial ini sampai kepada keluarga yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Suharto, Azman dan Baba (2021:22) pendidikan dalam PKH bertujuan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima PKH tetap bersekolah dan mendukung keluarga untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak melalui pembinaan atau penyuluhan. PKH juga mencakup komponen pemberian bantuan pendidikan yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang seringkali menjadi kendala bagi keluarga miskin. Dana yang diberikan melalui PKH dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, seperti pembelian alat tulis, seragam sekolah, dan biaya transportasi (Anjaini, Permatasari & Irawan, 2024:32).

## METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Amabaan, Kabupaten Simeulue, yang meliputi keluarga miskin yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat program tersebut. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Amabaan yaitu 265 KK yang tersebar kedalam beberapa dusun dengan

---

menggunakan teknik proportional random sampling, sampel yang diambil sebanyak 45% dari total populasi, yaitu 40 KK. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah Angket, Lembar Observasi dan Wawancara. Teknik untuk mengoleksi data dalam penelitian ini adalah observasi, Angket dan Dokumentasi. Teknik analisis data adalah dengan menggunakan metode analisa yang dikembangkan oleh Miles and Huberman yaitu reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Amabaan, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penelitian diawali dengan observasi lapangan guna mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan pelaksanaan program sebelum pengumpulan data utama dilakukan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di desa ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Masih terdapat sejumlah keluarga miskin yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan secara signifikan meskipun telah menjadi penerima manfaat program. Temuan ini memperkuat pentingnya analisis lebih mendalam terkait sejauh mana pengaruh PKH terhadap masyarakat miskin rentan, faktor penghambat implementasinya, serta peran pendamping dalam mendukung keberhasilan program.

Data penelitian diperoleh melalui angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 40 keluarga penerima manfaat dari total 265 keluarga sasaran program. Data yang dikumpulkan mencakup dua aspek utama, yaitu pelaksanaan PKH dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil angket, mayoritas responden menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi terhadap pelaksanaan program, dengan rata-rata skor yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berada pada kategori "setuju" dan "sangat setuju." Dari 40 pertanyaan yang diajukan, hampir seluruh responden memberikan penilaian positif terhadap peran PKH dalam membantu kebutuhan dasar keluarga. Hasil kuantitatif menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program mencapai 84,7%, sedangkan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan berada pada angka 83,53%.

Wawancara mendalam dengan penerima manfaat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai dampak PKH terhadap kehidupan keluarga miskin di Desa Amabaan. Sebanyak 89% responden menyatakan bahwa bantuan telah disalurkan secara tepat sasaran. Sebagian besar penerima menyebutkan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam pembiayaan kebutuhan pendidikan anak dan pelayanan kesehatan keluarga, meskipun jumlah bantuan yang diterima belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan ekonomi rumah tangga. Mereka juga mengungkapkan bahwa tahap pencairan yang tidak teratur dan nominal bantuan yang terbatas menjadi faktor penghambat utama efektivitas program. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKH memberikan manfaat

nyata, masih diperlukan perbaikan dalam aspek manajemen dan distribusi agar dampaknya lebih optimal.

Hasil observasi lapangan mendukung temuan tersebut, di mana peran pendamping PKH dinilai cukup positif dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan dana bantuan secara tepat sasaran. Namun, ditemukan pula beberapa permasalahan dalam implementasi di lapangan, seperti penggunaan bantuan yang tidak sepenuhnya sesuai peruntukan—misalnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif lain di luar pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kegiatan sosialisasi oleh pendamping masih jarang dilakukan secara rutin, sehingga informasi terkait tujuan dan mekanisme program belum sepenuhnya dipahami oleh semua penerima. Meskipun hampir seluruh keluarga miskin rentan telah terdaftar sebagai penerima PKH, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum tercakup oleh program ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan. Program ini membantu mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin dan mendukung peningkatan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan dalam validasi data penerima, penyesuaian besaran bantuan, serta peningkatan frekuensi sosialisasi dan pendampingan. Dengan strategi implementasi yang lebih terarah, PKH berpotensi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## Pembahasan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen kebijakan sosial yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan secara struktural melalui bantuan bersyarat kepada rumah tangga miskin dan rentan. Tujuan utama program ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya. Penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana pelaksanaan PKH di Desa Amabaan mampu mencapai tujuan tersebut dan sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas diukur melalui sejauh mana program dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat serta mengurangi kerentanan sosial-ekonomi yang mereka hadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PKH memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas penerima manfaat mengakui bahwa bantuan tersebut membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam hal biaya pendidikan anak dan akses layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama PKH sebagai program perlindungan sosial bersyarat yang mendorong keluarga miskin untuk berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Meskipun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih

terdapat berbagai hambatan yang mengurangi potensi dampak yang dapat dicapai. Temuan ini mengindikasikan bahwa PKH perlu terus diperkuat baik dari aspek perencanaan maupun implementasi agar dapat memberikan manfaat yang lebih komprehensif.

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas PKH di Desa Amabaan adalah besaran bantuan yang dianggap belum memadai oleh sebagian besar penerima. Bantuan yang diterima sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sementara dan tidak cukup untuk mendukung transformasi sosial-ekonomi jangka panjang. Akibatnya, meskipun bantuan tersebut mampu meringankan beban hidup, keluarga penerima masih sulit keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, waktu pencairan yang tidak konsisten dan kadang mengalami keterlambatan juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Ketidakpastian ini menyebabkan penerima kesulitan dalam merencanakan pengeluaran rumah tangga secara efektif, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan tidak tercapai secara optimal.

Selain masalah teknis dalam penyaluran bantuan, permasalahan lain yang teridentifikasi adalah terkait dengan akurasi data penerima. Masih terdapat kasus di mana keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan tidak terdaftar, sementara beberapa keluarga dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik justru menjadi penerima manfaat. Ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan validasi data penerima perlu menjadi prioritas dalam perbaikan sistem pelaksanaan PKH. Integrasi data antarinstansi dan penggunaan teknologi berbasis data kependudukan dapat menjadi solusi untuk meminimalkan kesalahan dalam penentuan penerima.

Peran pendamping PKH juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada penerima manfaat tentang penggunaan bantuan secara tepat guna, serta mendorong mereka untuk memanfaatkan bantuan sebagai investasi dalam pendidikan dan kesehatan keluarga. Namun, efektivitas peran pendamping masih belum optimal karena kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin. Minimnya interaksi antara pendamping dan penerima manfaat berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang tujuan program dan cara memaksimalkan manfaatnya. Penguatan kapasitas pendamping dan peningkatan intensitas sosialisasi perlu dilakukan untuk memastikan bantuan digunakan secara produktif.

Dari hasil wawancara dan observasi juga diketahui bahwa sebagian penerima memanfaatkan bantuan untuk keperluan di luar peruntukan, seperti kebutuhan konsumtif jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan yang lebih intensif agar masyarakat memahami bahwa bantuan PKH bukan sekadar dana tambahan, tetapi merupakan instrumen pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan secara lebih strategis untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap

peningkatan kesejahteraan keluarga, seperti investasi dalam pendidikan anak, perbaikan gizi, atau modal usaha kecil.

Secara kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Amabaan memiliki tingkat keberhasilan sebesar 84,7%, sedangkan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai 83,53%. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai kendala, PKH tetap memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penerima manfaat. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dari perbaikan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga miskin secara umum. Hasil ini sejalan dengan tujuan PKH untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui investasi jangka panjang pada sumber daya manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKH merupakan salah satu program intervensi sosial yang relevan dan efektif dalam konteks penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan seperti Desa Amabaan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan akurasi data penerima, peningkatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran bantuan, hingga penguatan peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan perbaikan tersebut, PKH dapat menjadi instrumen kebijakan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif dalam mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat miskin menuju kondisi yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Amabaan melalui dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, meskipun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan mencapai 84,7% dan efektivitas sebesar 83,53%, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima, jumlah bantuan yang terbatas, serta ketidakteraturan pencairan yang menghambat pencapaian tujuan secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan validasi data, penyesuaian besaran bantuan, perbaikan mekanisme distribusi, serta penguatan peran pendamping dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan manfaat PKH dalam memutus rantai kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ambarwati, Arie (2021) *Perilaku dan Teori Organisasi*. Bandung: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Asmirijal, N. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Good Governance Terhadap Perkembangan Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue) (Doctoral dissertation, Universitas Teuku Umar).



- Desky, T. R. (2024). Pengaruh Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Syariah*, 2(2), 01-07.
- Fedihartono, C. M., Virjannah, N. A., & Yasin, M. (2023). Pengaruh Kurs Terhadap Pengangguran, Utang Luar Negeri, Neraca Perdagangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 01-13.
- Ferdi, Y. (2021). Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Simeulue. *Journal Ekonomi Pembangunan* 66, 41.
- Jefri Anjaini, Mahardhika Nur Permatasari, Hery Irawan · 2024. Pemberdayaan Masyarakat (Strategi, Model, dan Inovasi untuk Transformasi Sosial). (2024). (n.p.): Bayfa Cendekia Indonesia.
- Kurniawan dan Priambodo (2022), *Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Maklassa (2023), *Manajemen Perilaku*. Jakarta: Nas Media Pustaka.
- Mujiyadi (2019), *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Mulyono, H., Fikri, M. H., & Munawaroh, M. (2024). Sosialisasi Ekonomi Syariah Solusi Bangsa Untuk Memakmurkan Masyarakat. *Dedikasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 91-100.
- Sari, N. P. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan-FE UMUSLIM*, 14(2), 16-22.
- Sastrawan, B. ., Samsi, A., & Seran, G. G. . (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat . *Karimah Tauhid*, 3(1), 473-479. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11642>
- Setiawan, H. H. (2020). *Kewirausahaan sosial: penerima program keluarga harapan (PKH) graduasi*. Indonesia: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
- Suharto, E., Azman, A., Baba, I. (2011). *Pendidikan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Di Indonesia & Malaysia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Suleiman, A (2021), *Jaring Pengamanan Digital: Kesejahteraan Rakyat Dan Hak Warga Negara Di Era Disrupsi Disertai 29 Rekomendasi Kebijakan Konkret*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama